

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2025-2029**



**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA BANDA ACEH**

Jl. Teungku Dikarieng No. 12 Dusun Kemuning, Gampong Kerdoh, Kota Meja



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Tgk. Djuanda No. 12 Gampong Kerah, Kuta Raja
Email : dipersip@bandaceh.go.id Website : dipersip.bandaceh.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BANDA ACEH

Nomor : 11 TAHUN 2020

TENTANG

INDIKATOR KEMERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020 - 2020

- Membidang :
1. Tidak terlaksananya ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Per/09/M.PAN/2000 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 2. Tidak terlaksananya perluasan akses data perisip sertifikasi indikator Kinerja Utama Data (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh);
- Meringkat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (RPJN);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Hubungan Keuangan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kota Banda Aceh di Banda Aceh;
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2015-2045;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perubahan Nama Wilayah Kecamatan Daerah Tingkat 2 Banda Aceh;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengawasan Keuangan dan Kinerja Instansi Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tabung, Tata Cara Penyelenggaraan, Pengelolaan, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Nasional Pemerintah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengawasan Pembangunan Nasional;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Mewah Nasiona (RPJMN) Tahun 2015-2020;
 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Per/09/M.PAN/2000 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi rangkaian peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintahan daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Kebijakan, Struktur dan Mekanisme Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Standar Akreditasi sebagai Instruksi Pemerintah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/135-2409 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5689 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Kualitas, Keefektifan dan Nominasi Perencanaan dan Keuangan Daerah;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Perencanaan RPJPD dan Rencana Strategis Daerah;
24. Surat Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perencanaan dan Susunan Program Daerah Kota Banda Aceh;
25. Surat Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Surat Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029;
26. Surat Perintah Aeri Nomor 08 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aeri (RPJPA) Tahun 2025 - 2045;
27. Surat Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banda Aceh Tahun 2025-2045;
28. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Perencanaan dan Keuangan Kota Banda Aceh.

MEMUTUSKAN :

- | | |
|---------------------|--|
| Menetapkan : | |
| KESATU | Indikator Kinerja Utama Dinas Perencanaan dan Keuangan Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. |
| KEDUA | Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan Indikator Samara sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategi Dinas Perencanaan dan Keuangan Kota Banda Aceh. |
| KETIGA | Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan sesuai dengan ketentuan rencana kerja tahunan, penyediaan rencana kerja dan anggaran, penyusunan dokumen Perencanaan Kinerja, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja sesuai Deklarasi Rencana Strategi Dinas Perencanaan dan Keuangan Kota Banda Aceh 2025-2029. |
| KEEMPAT | Keputusan ini berlaku pada tanggal dan apabila dimajukan hari tertentu terdapat keterlambatan dalam persiapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. |

Ditandatangani di : Banda Aceh
Tgl. tanggal : 5 Januari 2026

Wakil Dinas Perencanaan dan Keuangan


DR. ARIYANTO, SH
 Wakil Walikota Banda Aceh, IV/1
 Telp. (0656) 907013 & 907012

Sl. No.	Name of the Candidate	Roll Number	Grade	Status	Remarks
1	[Name]	[Roll No.]	[Grade]	[Status]	[Remarks]
2	[Name]	[Roll No.]	[Grade]	[Status]	[Remarks]



 Director
 [Institution Name]
 [Address]
 [City]